**Peran Perbankan Syariah Dalam Pengimplementasian
Keuangan secara Global di Indonesia**

Risma Haryani Siregar¹, M. Irwan Padli Nasution²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rismaharyani21@gmail.com¹ irwannst@uinsu.ac.id²

ABSTRAC

The purpose of this study was to investigate how Islamic banks helped to implement financial inclusion in Indonesia. Financial inclusion is the process of making formal financial access available to those with low incomes who are unbanked. Mixed research was used in the design of this study, which combined qualitative and quantitative methods. Using Straruss and Corbin's theory, the qualitative data were analyzed in three main steps: selective coding, open coding, and axial coding. Comparative analysis of financial statements and financial ratios like CAR, ROA, ROE, NPF, and FDR were used to conduct a quantitative analysis of the data from 2010 to 2014. A significant increase in funding and financing between 2010 and 2014, as well as the findings of a financial ratio analysis, indicate that Islamic banking's performance and financial condition are excellent. This study demonstrated that Islamic banking had great potential for implementing financial inclusion.

Keywords: *Islamic banks; financial inclusion; financial exclusion.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana bank syariah membantu menerapkan inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan adalah proses membuat akses keuangan formal tersedia bagi mereka yang berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rekening bank. Penelitian campuran digunakan dalam desain penelitian ini, yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan menggunakan teori Straruss dan Corbin, data kualitatif dianalisis dalam tiga langkah utama: pengkodean selektif, pengkodean terbuka, dan pengkodean aksial. Analisis komparatif laporan keuangan dan rasio keuangan seperti CAR, ROA, ROE, NPF, dan FDR digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif data dari tahun 2010 hingga 2014. Peningkatan pendanaan dan pembiayaan yang signifikan antara tahun 2010 dan 2014, serta temuan analisis rasio keuangan, menunjukkan bahwa kinerja dan situasi keuangan perbankan syariah sangat baik. Studi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menerapkan inklusi keuangan.

Kata Kunci: perbankan syariah; keuangan inklusif; keuangan eksklusif

PENDAHULUAN

Industri perbankan Eropa telah hancur oleh krisis keuangan global tahun 1998, krisis keuangan 2008, dan krisis keuangan Eropa 2011. Kekuatan ekonomi global bergeser dari Barat ke Timur, khususnya Asia, sebagai akibat

dari situasi ekonomi ini. Negara-negara Asia justru mengalami pertumbuhan selama krisis ini.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Jhong Wha Lee menunjukkan bahwa negara-negara berkembang di Asia mengalami pertumbuhan pesat selama tiga dekade terakhir terutama karena peningkatan akumulasi modal yang signifikan, yang mencapai 6,01 persen pada tahun 2012 dan 6,6 persen pada tahun 2013. China, India, dan Indonesia masih mampu mempertahankan ekspansi ekonomi masing-masing berkat konsumsi domestik. Tingginya tingkat konsumsi yang diamati di China, India, dan Indonesia mungkin dipengaruhi oleh fakta bahwa ketiga negara tersebut memiliki populasi sekitar 2,8 miliar orang—kira-kira 40 % dari populasi dunia.

Xiaoqiang Cheng dan Hans Degryse (2010) berpendapat bahwa baik sektor keuangan perbankan maupun non-bank berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pertumbuhan industri perbankan berpotensi untuk memacu ekspansi ekonomi. Penelitiannya menunjukkan bahwa penyaluran kredit dan layanan perbankan lainnya dapat mendorong ekspansi ekonomi.

Akses ke lembaga keuangan untuk masyarakat umum belum memberikan kontribusi terhadap ekspansi ekonomi Asia. Selain itu, masyarakat Indonesia masih kekurangan akses ke lembaga keuangan. Indeks Inklusi Keuangan Indonesia hanya 19,6 persen, menurut Global Financial Inclusion Index (2011), yang didasarkan pada Data dari Bank Dunia. Malaysia memiliki 66,7 %, Filipina memiliki 26,5 %, Thailand 77,7 %, Vietnam 21,4%, India 35,2%, China 63,8 %, Rusia 48,2% , dan Brasil 54,9 %.

Lembaga keuangan sulit diakses oleh masyarakat. Pembiayaan UMKM yang rendah, suku bunga pinjaman mikro yang tinggi, informasi yang asimetris, saluran distribusi jasa keuangan yang terbatas, monopoli perbankan di sektor mikro, dan kemampuan pengelolaan UMKM yang belum memadai semuanya berkontribusi terhadap tingginya angka tersebut dari individu unbankable. Inklusi keuangan harus segera dilaksanakan karena ini.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah metode campuran, Dengan menggunakan strategi eksplorasi sekuensial, penelitian lapangan kuantitatif dan kualitatif dilakukan. John W. Creswell (2009) menyatakan bahwa strategi eksplorasi sekuensial dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif sebelum beralih ke data kuantitatif. Temuan tahap pertama menjadi landasan bagi pengumpulan dan analisis tahap kedua.

Baik data primer maupun data sekunder digunakan oleh penulis. Menurut Hendri Tanjung dan Abrista Devi (2013), data sekunder adalah data yang dapat langsung dimanfaatkan oleh peneliti dan telah disusun atau dipublikasikan oleh instansi terkait. Istilah “data primer” mengacu pada berbagai instrumen penelitian yang harus digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, pengenalan keuangan secara global di Indonesia baru terjadi tahun 2010. Dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, Bank Indonesia meluncurkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (NSFI). Namun mempengaruhi 32%, atau 76 juta orang (pengecualian keuangan). Selain itu, antara 60 hingga 70 persen UMKM tidak memiliki akses ke perbankan. Padahal hampir 53 juta orang miskin bekerja di sektor UMKM mungkin dapat mengurangi pengangguran dan mengurangi kebutuhan.

Pendirian BMT (Baitul Mal wa al-tamwil) dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dua contoh dari berbagai metode yang digunakan untuk menerapkan keuangan inklusif di Indonesia. KUR adalah program kredit usaha yang unik untuk koperasi dan mikro dan Usaha Menengah (UMKM) yang telah memenuhi persyaratan kelangsungan usaha tetapi tidak memiliki agunan yang dipersyaratkan oleh perbankan. Perusahaan jaminan lebih kuat.

Pada tanggal 5 November 2007, program KUR secara resmi diluncurkan. Menyusul pada tanggal 9 Oktober 2007, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) penjaminan kredit dan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut. Dalam pelaksanaan program KUR, terdapat tiga pilar utama: 1) Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah membantu, mendorong, dan mendukung penyaluran dan penjaminan kredit; (2) Lembaga Penjamin menjadi penjamin pinjaman bank dan bertindak sebagai wakil pemerintah; 3) Perbankan. UMKM dan koperasi menerima kredit dari bank, yang berfungsi sebagai penerima jaminan dan menggunakan dana internal mereka sendiri untuk melakukannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan survei di 20 provinsi pada tahun 2013 dengan 8.000 responden menemukan bahwa penduduk Indonesia memiliki tingkat literasi (pemahaman) keuangan yang relatif rendah. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya inklusi keuangan warga. Pasar modal dipahami oleh 4%, jasa asuransi 18%, pegadaian 15%, lembaga keuangan 7%, dan perbankan oleh 22% masyarakat umum. Hasil ini menunjukkan bahwa

masyarakat Indonesia tidak punya pilihan selain meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap jasa keuangan melalui program dan kebijakan, khususnya yang dapat membantu rumah tangga berpendapatan rendah yang kesulitan mendapatkan dukungan kredit dari lembaga keuangan formal.

Di Indonesia, penerapan keuangan inklusif juga sangat bergantung pada institusi perbankan syariah. Dengan asumsi kita flashback ke tahun 2008, jumlah pemain di industri keuangan syariah sekitar 155, khususnya 3 Bank Usaha Syariah (Transportasi), 28 Syariah Unit Khusus (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Perorangan Syariah (BPRS). Jumlah tersebut kini meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan manfaat menggunakan produk keuangan tanpa bunga. Indonesia memiliki 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Syariah Unit Usaha (UUS), dan 16 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) per bulan Desember 2013. Ini adalah bukti nyata bahwa terlepas dari ketidakstabilan ekonomi, seperti krisis 1998, 2008 dan 2013 di Eropa, perbankan syariah terus berkembang. Perkembangan kuantitatif ini telah menyebar dari pusat ke daerah, memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Diharapkan lembaga keuangan formal bangsa ini, termasuk keberadaan perbankan syariah sebagai komponen penting, akan mampu menerapkan keuangan inklusif.

PEMBAHASAN

Perbankan berperan penting dalam memberikan akses kepada individu-individu yang unbankable. Setiap tahun industri perbankan Indonesia berkembang. Jumlah kantor cabang yang semakin banyak, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pinjaman bank menunjukkan hal ini. Layanan perbankan harus merata di seluruh Indonesia seiring dengan berkembangnya industri perbankan. Seluruh provinsi di Indonesia harus memiliki akses terhadap layanan perbankan. Derajat inklusi keuangan, baik di seluruh Indonesia secara keseluruhan maupun di dalam setiap provinsi, dapat digunakan sebagai ukuran pemerataan layanan perbankan. Suatu kerangka moneter komprehensif yang tak dapat disangkal dapat menetapkan aset yang berguna lebih produktif, bekerja pada kapasitas daerah untuk mengawasi dana, mengurangi perkembangan pinjaman kasual manipulatif (kredit oleh rentenir).

a. Pendanaan Bank Syariah

Sistem keuangan inklusif harus dapat diakses oleh berbagai pengguna, sehingga harus memiliki pengguna sebanyak mungkin. Ukuran penetrasi bank adalah persentase populasi yang memiliki rekening. Menurut data dari Bank Dunia dari tahun 2010, dua pertiga orang Indonesia sudah memiliki tabungan.

Sekitar setengahnya memiliki rekening di lembaga keuangan resmi. Hanya sebagian kecil yang menabung di lembaga keuangan mikro dan koperasi, sedangkan mayoritas melakukannya di bank. Sekitar 18 persen memiliki tabungan di tempat lain, seperti di pesta dan acara lainnya.

Menurut Ascarya (2007), salah satu langkah perencanaan ke depan dapat dilakukan dengan menabung di bank syariah. Tujuan dari produk dana dan tabungan bank syariah adalah untuk memastikan keuntungan yang adil bagi semua pihak dengan memobilisasi dan menginvestasikan tabungan untuk pembangunan ekonomi. Untuk penyiapan toko penting karena Islam secara tegas mengecam para penimbun dana investasi dan meminta pemanfaatan aset yang bermanfaat untuk mencapai tujuan keuangan Islam. Dalam hal ini, bank syariah menganut ajaran hukum Islam, khususnya wadi'ah, qard, mudharabah, dan ijarah, bukan prinsip bunga (riba).

b. Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan perbankan syariah menggunakan berbagai akad, antara lain akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, akad ijarah, dan akad qard. pembiayaan meningkat setiap tahunnya mencapai 50,56 % tahun 2011, 43,69% tahun 2012, 24,82% tahun 2013, 7,17% tahun 2014, dan 0,69 persen per Maret 2015 pembiayaan perbankan syariah.

Bank Umum Syariah berikut ini merupakan contoh perkembangan pembiayaan perbankan syariah. Antara tahun 2010 dan 2015, pembiayaan BSM meningkat signifikan, meningkat sebesar 44,39% pada 2010, 53,23% pada 2011, 21,84% pada 2012, 12,76% pada 2013, dan pertumbuhan negatif tipis sebesar 2,6% pada tahun 2014 akibat perlambatan ekonomi dunia. Jika dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah nasional, BSM menguasai pembiayaan dengan pangsa rata-rata 30,76%.

Berbeda dengan bank umum, bank syariah berfungsi sebagai bank sosial. Oleh karena itu, bank syariah menyadari pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian nasional. Bank syariah juga memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM. Bahkan, Bapak Azhar Syarief (2015), Learning and Culture Manager BRI Syariah, menyatakan bahwa microfinance merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan prospek yang sangat baik, sehingga saat ini banyak bank yang mempelajarinya.

Saat ini, aspek pembiayaan produktif menjadi fokus utama Usaha Mikro. Program "Serbu Pasar & Meja Terbuka" telah menerima sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan, masing-masing, dari pedagang pakaian, sembako, dan barang lainnya. Micro 25, Micro 75, dan Micro 500 adalah tiga pilihan pembiayaan mikro perusahaan. Sesuai dengan namanya,

Mikro 25 adalah pilihan pembiayaan dengan jumlah maksimum Rp25 juta, kemudian lebih. Kisaran plafon pembiayaan untuk 2014 antara Rp5 juta hingga Rp300 juta.

Sejumlah bank umum syariah menjadi saksi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah secara khusus. Antara tahun 2010 dan 2015, pembiayaan BSM meningkat signifikan, meningkat 44,39 persen pada 2010, 52,23 persen pada 2011, 21,84 persen pada 2012, 12,76 persen pada 2013, dan sedikit pertumbuhan negatif sebesar 2,6% pada tahun 2014 sebagai akibat dari perlambatan ekonomi global. Jika dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah nasional, BSM menguasai pembiayaan dengan pangsa rata-rata 30,76 persen.

Menurut Azhar Syarief, Learning and Culture Manager BRI Syariah (2015), BRI Syariah memiliki tingkat Non Performing Financing (NPF) yang rendah untuk microfinancing. Bahkan pada 2012-2013, BRI Syariah memiliki tingkat NPF nol persen. Hal ini karena pemeliharaan nasabah menjadi tanggung jawab seorang relationship officer di BRI Syariah. Bank bertemu dengan nasabah sebulan sekali untuk mengingatkan mereka tentang pembayaran, mengadakan pengajian, acara, dan lain-lain. Amplop merah putih digunakan untuk mengajari individu yang tidak memiliki rekening bank bagaimana mengelola uang mereka. Amplop putih untuk dikembalikan sebagai modal usaha dan amplop merah untuk membayar bank dengan mencicil. Selain itu, pelanggan belajar bagaimana membuat laporan keuangan langsung. Salah satu pilar ekspansi bisnis, keuangan mikro syariah BRI terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. 27.924 rekening nasabah dikelola oleh 291 outlet unit mikro syariah secara keseluruhan.

Bank Syariah Bukopin menawarkan Pinjaman iB Qardh, yang melibatkan pinjaman uang tanpa pembayaran dan mengharuskan peminjam untuk membayar kembali pokok pinjaman segera atau dalam jumlah yang lebih kecil selama jangka waktu yang telah ditentukan, di samping bentuk pembiayaan lainnya. Tren positif pembiayaan BSB yang disalurkan sepanjang tahun 2013. Pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi masing-masing menyumbang 30,68 persen terhadap total pembiayaan BSB tahun 2013 berdasarkan jenisnya; 31,43%; 37,89%. Dengan tingkat pertumbuhan 64,69 persen, pembiayaan konsumsi tumbuh paling tinggi.

Selama tahun 2013, pembiayaan UKM non-bank tetap unggul secara signifikan dibandingkan pembiayaan UKM non-bank. Sembilan bidang bisnis utama BSB-telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, minyak dan gas, transportasi, pariwisata dan perhotelan, real estat dan konstruksi, perdagangan

umum, lembaga keuangan dan perusahaan keuangan -diselaraskan dengan fokus bisnis keuangan di sektor UKM. Dilakukan dengan hati-hati dan selektif.

c. Analisis rasio perbankan syariah

Menurut kutipan Kasmir, dengan membagi satu angka dengan angka lainnya, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja dan keadaan keuangan perusahaan. Rasio keuangan akan memberikan indikasi kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bank. Rasio keuangan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan bank dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya untuk mengetahui perkembangan dan stabilitas bank.

Seperti yang ditunjukkan oleh Imad A. Salman (2013), investigasi proporsi sangat penting untuk menentukan ketergantungan bank. Pengaruh kas, aset, likuiditas, ekuitas, dan faktor lainnya dapat dievaluasi dengan menggunakan analisis rasio keuangan dapat diidentifikasi sebagai penentu utama profitabilitas, yaitu salah satu tujuan bank umum. Agar bank dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan menjadi sumber modal masyarakat untuk menggerakkan perekonomian, diperlukan penelitian berbasis analisis rasio terhadap kinerja perbankan.

Perkembangan lembaga perbankan syariah juga merupakan akibat langsung dari keberhasilan kinerja perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan dana pihak ketiga, jumlah pembiayaan yang diberikan melebihi 90 persen, menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan berfungsi secara optimal. Perbankan syariah telah menunjukkan kemampuannya dalam mempertahankan standar tinggi pembiayaan yang diberikan, yang menghasilkan non-performing financing (NPF) yang relatif rendah dibandingkan dengan perbankan nasional.

Perbaikan indikator keuangan utama mendukung pertumbuhan positif perbankan syariah dalam hal penghimpunan dana, pembiayaan, dan laba bersih. Rasio pengembalian aset (ROA) terhadap pengembalian ekuitas (ROE) dan rasio kecukupan modal minimum (CAR) masih dalam batas parameter peraturan yang berlaku.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015), CAR bank syariah tetap dalam kisaran aman selama enam tahun terakhir. Sejak 2010 hingga Maret 2015, perbankan syariah memiliki rasio CAR 16,25%, 16,63%, 14,13%, 14,42 %, 15,74% dan 13,85%. Ini masih lebih tinggi dari batas minimum Bank Indonesia 8%. Rasio Return on Assets (ROA) perbankan Indonesia juga meningkat selama beberapa tahun terakhir, mencapai 1,67% pada 2010, 1,79% pada 2011, 2,04% pada 2012, 0,85% pada 2014, dan 1,13% pada Maret 2015 Rasio Return on

Assets (ROA) bank syariah juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 1,67 persen pada 2010, 1,79 persen pada 2011, 2,14 persen pada 2012, 2,00% pada 2013, dan 1,13 persen per Maret 2015. Namun, bank syariah masih dapat memperoleh keuntungan dari asetnya meskipun mengalami penurunan pada tahun 2014. Return on equity (ROE) juga meningkat seiring dengan kenaikan ROA. Per Maret 2015 sebesar 17,58 persen pada 2010, 15,73 persen pada 2011, 24,06 persen pada 2012, 17,24 persen pada 2013, 5,55 persen pada 2014, dan 8,91 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen untuk mengambil keuntungan dari aset perusahaan.

Selain itu, Tingkat Non Performing Financing (NPF) yang relatif rendah menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjaga kualitas pembiayaannya sejak 2010, yaitu berkisar 3,02% pada 2010, 2,52% pada 2011, 2,22% pada 2012, 2,62% pada 2013, 4,33% pada 2014, dan 4,81% pada Maret 2015. Dibandingkan dengan NPL perbankan nasional, angka tersebut relatif rendah.

Di perbankan syariah, financing to deposit ratio (FDR) sangat baik: 89,67% pada 2010, 88,94% pada 2011, 100,00% pada 2012, 10,32% pada 2013, 91,50% pada 2014, dan 94,24% per Maret 2015. Diharapkan regulator BI, bank syariah mampu menjaga tingkat FDR antara 78% hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu menjalankan perannya secara efektif sebagai lembaga intermediasi. Dana pihak ketiga (DPK) tidak dibiarkan menganggur; melainkan diarahkan pada industri yang sebenarnya. BOPO bank syariah, atau rasio biaya operasional terhadap pendapatan, masih cukup tinggi. Hal ini wajar karena bank syariah masih berkembang pesat untuk mencapai tujuan bisnis.

KESIMPULAN

Pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat dari peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat 15% hingga 45% setiap tahunnya, dan pembiayaan, menurut analisis peran yang dimainkan perbankan syariah dalam implementasi keuangan di Indonesia. inklusi tumbuh sebesar 50,05 persen pertahun. Analisis rasio keuangan juga didukung dengan baik. Rasio pembiayaan perbankan syariah terhadap DPK (FDR) juga sangat baik pada limit BI 87%-100%. Di perbankan syariah, rasio kecukupan modal minimum (CAR) cukup tinggi—minimal 15%. Yang juga sangat menguntungkan adalah rasio aset terhadap ekuitas pendapatan (ROA/ROE). Bahkan di keuangan mikro, bank syariah memiliki NPF nol persen, sehingga jumlah kredit bermasalah rendah—di bawah 5%. Biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) tetap relatif tinggi karena perbankan syariah berkembang pesat di seluruh Indonesia. Ekspansi perbankan syariah sebanding dengan ekonomi riil.

Konsekuensi dari penelusuran relatif antara laporan anggaran dan pemeriksaan proporsi menunjukkan bahwa penyajian dan keadaan moneter perbankan syariah sangat besar. Oleh karena itu, perbankan syariah dapat memimpin upaya Indonesia untuk menerapkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan melalui perbankan syariah juga akan didukung oleh produk perbankan syariah yang mengemban misi sosial dan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chapra, U. 2001. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, U. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaudry, M.S. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, terj. Suherman Rosyidi*. Jakarta: Kencana.
- Faiz, A & O. Noviandi. 2009. *Menyongsong Sistem Ekonomi anti Krisis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009.
- Kahf, M. 1955. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Khan, M.A. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Kuala Lumpur: Percetakan Zafar SDN BHD.
- Singarimbun, M. & S. Effendi. 2008. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sjahdeini, S.R. 2010. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, N. 2014. *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Gramedia.